



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN BERAU**

TAHUN 2019

Kata Pengantar

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas,Dinas Kesehatan Kabupaten Berau telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan Wajib dan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten berau

drg. Totoh hermanto,M.kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630812 199203 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1
C. Nama Perangkat Daerah	1
D. Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Yang Dilaksanakan	2
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	2
F. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah	4
BAB II URUSAN KONKRUEN	
A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	11
B. Program dan Kegiatan	11
C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	15
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.	17
E. Alokasi dan Realisasi Anggaran	18
F. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	34
G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	35
H. Permasalahan dan Solusi	36
BAB III REALISASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2018	42
A. Program dan Kegiatan	42
B. Alokasi dan Realisasi Anggaran	44
C. Permasalahan dan Solusi	51
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN	58
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	59
A. Kerjasama Antar Daerah	59
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	59
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	61

BAB VI PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI	62
A.PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL	62
B.PENGHARGAAN TINGKAT PROPINSI	62
BAB VII PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H) ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur kedudukan, Susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan.

B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi dari Organisasi Dinas Kesehatan Mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala seksi, hingga UPTD.

C. Nama Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.



D. Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Yang Dilaksanakan

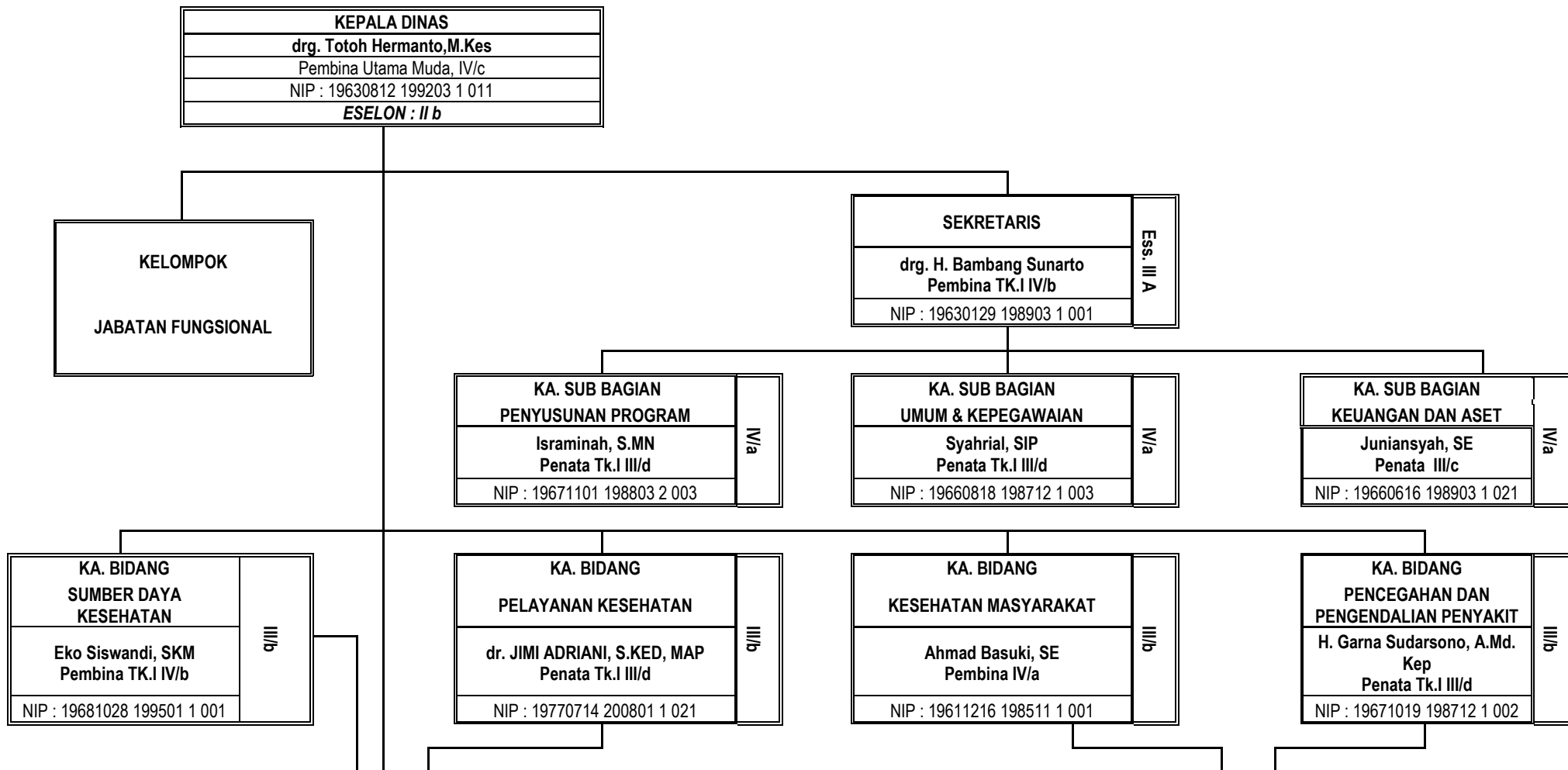
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

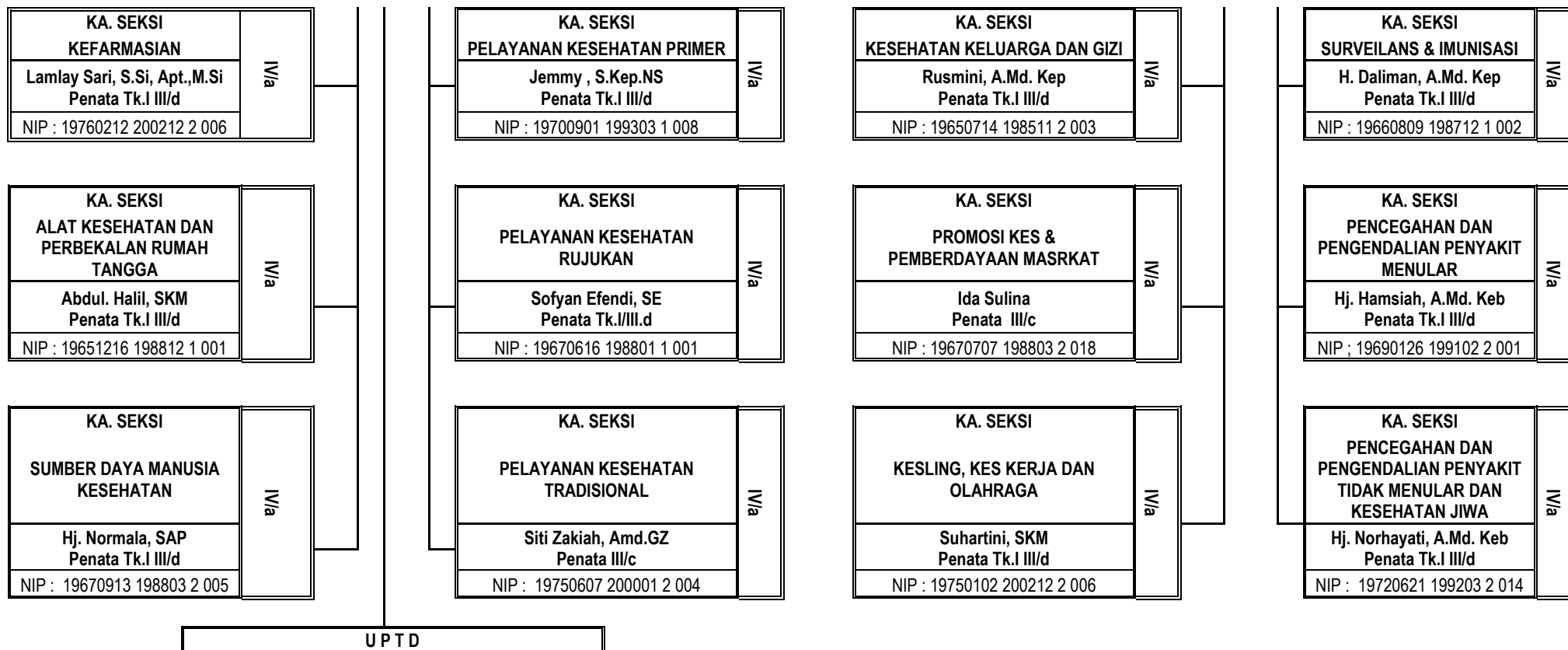
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan yang menampilkan nama jabatan, nama pejabat, golongan pejabat dan NIP pejabat mulai pejabat eselon II s/d eselon IV per 31 Desember 2018.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2018





Sumber Data : Sub Bag Umpeg 31 Des 2018

F. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah

Daftar urut kepangkatan seluruh pegawai Dinas Kesehatan (PNS, PTTD, Kontrak Kegiatan) per 31 Desember 2018



**Tabel I.1 DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BERAU 2018**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN			M KERJ GOL		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR			TEMPAT
			GOL	T.M.T	N A M A	ESLN	T.M.T	THN	BL	NAMA	THN	JAM	NAMA	LL S	T K	TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	Drg. Totoh Hermanto,Mkes	19630812 199203 1 011	IV/c		Kepala Dinas	II/b				PIM II			S2 Kes			DINKES
2	Drg. Bambang Sunarto	19630129 198912 1 001	IV/b		Sekretaris	III/a							S1			DINKES
3	Eko Siswandi, SKM	19681028 199501 1 001	IV/b		Kabid SDK	III/b				PIM III			SKM			DINKES
4	Lamlay Sarie, S.Si,Apt	19760212 200212 2 006	IV/a		Kasi Kefarmasian	IV/a							Apoteker			DINKES
5	A. Basuki, SE	19611216 198511 1 001	IV/a		Kabid Kesehatan Masyarakat	III/b				PIM IV	2010		S1.Ekonomi			DINKES
6	Garna Sudarsono, Amd.Kep	19671019 198712 1 002	III/d		Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	III/b				LPJ			D3 Akper			DINKES
7	dr.Jimmy Adriani	19770714 200801 1 021	III/d		Kabid Pelayanan Kesehatan	III/b							S1 Kedokteran			DINKES
8	Abdul Halil, SKM	19651216 198812 1 001	III/d		Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga	IV/a				PIM III	2011		S1 Kesmas			DINKES
9	Syahrial, S.IP	19660818 198712 1 003	III/d		Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a				PIM IV			S1Pemerintahan			DINKES
10	Sofyan Effendi, SE	19670616 198801 1 001	III/d		Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	IV/a				PIM IV			S1 Ekonomi			DINKES
11	Israminah, SAP	19671101 198803 2 003	III/d		Kasubag Penyusunan Program	IV/a							S1Pemerintahan			DINKES
12	Hj. Normala, SAP	19670913 198803 2 005	III/d		Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	IV/a				Adum	2000		S1Pemerintahan			DINKES
13	Daliman	19660809 198712 1 002	III/d		Kasi Surveilans dan Imunisasi	IV/a				LPJ			D3 Akper			DINKES
14	Hamsiah, Amd.Keb	19690126 199102 2 001	III/d		Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	IV/a							D3 Akbid			DINKES
15	Rusmini, Amd.Kep	19650714 198511 2 003	III/d		Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi	IV/a							D3 Keperawatan			DINKES
16	Nurhayati, A.Md.Keb	19720621 199203 2 014	III/d		Kasi Pencegahan dan Pengendalian PTM	IV/a							DIII Akbid			DINKES
17	Suhartini, SKM	19751002 200212 2 006	III/d		Kasi Kesling, Kesehatan Kerha dan Olah Raga	IV/a				PIM IV			S1 Kesmas			DINKES
18	Ony Suharni, S.Farm Apt	19811010 201001 2 008	III/d		Pengelola Kefarmasian								Apoteker			DINKES
19	Sandra N.M. M.K, Spd	19690929 199303 2 017	III/d		Pengelola Program Gizi								S1 Pendidikan			DINKES
20	Siti Zakiah, Amd,Gz	19750607 200001 2 004	III/c		Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	IV/a							D3 Gizi			DINKES
21	Agus Sulistiono	19720827 199203 1 004	III/c		Pengelola Barang Unit					LPJ	93		SPRG			DINKES
22	Juniansyah, SE	19660616 198903 1 021	III/c		Kasubag Keuangan & Aset	IV/a							S1.Ekonomi			DINKES



NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	M KERJ GOL		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR			TEMPAT		
			GOL	T.M.T		NAMA	ESLN	T.M.T	THN	BL	NAMA	THN	JAM		NAMA	LL S
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	17
23	Jemmy, S.Kep	19700901 199303 1 008	III/c		Kasi Kesehatan Primer	IV/a							S1 Perawat			DINKES
24	Ida Sulina	19670707 198803 2 018	III/c		Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	IV/a							SLTA/Pekarya			DINKES
25	Lisa Purnama, SH	19850515 201001 2 015	III/c		Pengadministrasi Kepegawaian								S1 Hukum			DINKES
26	Habibah A Nuraini, SKM	19851127 201001 2 004	III/c		Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan								S1 Kesmas			DINKES
27	Rini Juli Astuti, S.ST	19870727 201001 2 033	III/c		Pengolah Data Perencanaan								D4 Komputer			DINKES
28	Carina Pramadita, SKM	19870215 201001 2 007	III/c		Pengolah Data Perencanaan								S1 Kesmas			DINKES
29	Debby Hasbiah, SKM	19800306 201001 2 006	III/c		Analisis Kesehatan Penyakit Tidak Menular								S1 Kesmas			DINKES
30	Arbaen	19651104 198711 1 003	III/b		Pengelola Penyehatan Lingkungan								SPPH			DINKES
31	J a m r a h	19670101 198712 1 007	III/b		Pengelola Program Imunisasi					Adum	2000		SLTA/Pekarya			DINKES
32	S u j o k o	19650928 198712 1 004	III/b		Bendahara Pengeluaran Pembantu					Adum	2000		SLTA/Pekarya			DINKES
33	Sunarto	19690223 199203 1 003	III/b		Pengelola Gaji								SLTA			DINKES
34	Abdalis	19660403 198712 1 004	III/b		Pengadministrasi Umum								SLTA			DINKES
35	Djusni Biga Dangkua	19720624 199503 1 002	III/b		Pengelola Program Gizi								SPAG			DINKES
36	Ratna Latif, SKM	19860406 201001 2 008	III/b		Pengolah Data Perencanaan								S1 Kesmas			DINKES
37	Irma Yunita, SE	19790730 200701 2 008	III/b		Pengelola Pendapatan								S1.Ekonomi			DINKES
38	Siti R Salhah, Amd.Keb	19750403 200312 2 007	III/b		Analisis Kesehatan Ibu dan Anak								D3 Bidan			DINKES
39	Nurhamidah,Amd.Kep	19780703 200604 2 021	III/b		Analisis Pelayanan Kesehatan Rujukan								D3 Keperawatan			DINKES
40	Hery Santoso, Amd.Kep	19820408 200604 1 009	III/b		Pengadministrasi Kepegawaian								D3 Perawat			DINKES
41	M.Jupri Badar	19731019 199303 1 001	III/a		Pengadministrasi Umum								D3 Keperawatan			DINKES
42	Helena M, A.Md.Kep	19830521 200502 2 001	III/a		Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak								D3 Perawat			DINKES
43	Dedy A Chandra, Amd.Kep	19840315 200604 1 009	III/a		Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan								D3 Perawat			DINKES
44	Ady Haryono, Amd.Kep	19771221 199503 1 002	III/a		Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan								D3 Perawat			DINKES



NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	M KERJ GOL		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR			TEMPAT		
			GOL	T.M.T		NAMA	ESLN	T.M.T	THN	BL	NAMA	THN	JAM		NAMA	LL S
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	17
45	Yulianto	19751104 199603 1 001	III/a		Pengolah Data SIK								SPK			DINKES
46	Suci P Lestari, Amd.Kep	19830802 200801 2 002	III/a		Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan								D3 Perawat			DINKES
47	Eva Zusilawaty, Amd.Kep	19830929 201001 2 006	III/a		Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan								D3 Perawat			DINKES
48	Jona Pongdatu, Amd.Kep	19830602 200502 1 001	III/a		Pengolah Data SIK								D3 Perawat			DINKES
49	Yuni Ismawati, Amd Kep	19820614 201001 2 004	III/a		Pengolah Data Sumber Daya Manusia Kesehatan								D3 Perawat			DINKES
50	Budi Kasianto, A.MKg	19841221 200904 1 002	III/a		Verifikator Keuangan SPP/LS								D3 Perawat Gigi			DINKES
51	M Fitriani Noor, S.Kep. Ns	19870606 201001 1 004	III/a		Analisis Kesehatan Tradisional								SI Keperawatan			DINKES
52	Satriany Haruna,Amd.Kep	19810310 200801 2 019	III/a		Staff Kesehatan Lingkungan								D3 Perawat			DINKES
53	Aan Mariyati,Amd.Keb	19880325 201001 2 002	III/a		Staff P2P								D III bidan			DINKES
54	Mardina, Amd	19770817 200901 2 000	III/a		Pengelola Keuangan								D3			DINKES
55	Ellyanur Asmar	19870608 200904 2 005	II/d		Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung								D3 Perawat			DINKES
56	Harry Gunawan	19690605 198803 1 007	II/d		Pengadministrasi Umum								SLTA			DINKES
57	Ati Rahmaniah, Amd Kep	19810102 200502 2002	II/d		Verifikator Keuangan SPJ								D3 Perawat			DINKES
58	Hanifatur Rosyidah, AMKg	19850203 201101 2 008	II/d		Pengolah Data Sumber Daya Manusia Kesehatan								D3 Perawat Gigi			DINKES
59	Herman Setyono, Amd.Fis	19800114 200502 2 002	II/d		Pengadministrasi Kepegawaian								D3 Fisioterapi			DINKES
60	Didik Hardianto,Amd.KL	19870706 201001 1 003	II/d		Staff Kesehatan Lingkungan								D III Kes Ling			DINKES
61	Suzana Bota Makin	19800114 200502 2 003	II/d		Pengelola Program Kesehatan Keluarga								SPK			DINKES
62	Mariati Mapun	19780313 200602 2 021	II/d		Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung								SPK			DINKES
63	Ardiansyah	19760403 200701 1 010	II/d		Penyimpan Barang								SLTA			DINKES
64	Samsul Bahri	19770227 200701 1 009	II/d		Bendahara Pengeluaran								SLTA			DINKES
65	Romansa	19820625 200701 1 001	II/d		Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang								SLTA			DINKES
66	Herwandi, Amd.Kep	19810502 200604 1 025	II/d		Staff Keuangan & Aset								DIII Perawat			DINKES



NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	M KERJ GOL		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR			TEMPAT TUGAS		
			GOL	T.M.T		ESLN	T.M.T	THN	BL	NAMA	THN	JAM	NAMA		LL S	T K
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	17
67	M. Bachtiar Rivai	19821126 200604 1 011	II/c		Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan								SMF			DINKES
68	Kristina Guntari	19770826 200801 2 015	II/c		P engadministrasi Umum								SLTA			DINKES
69	Agus Fitriah	19800813 200801 2 017	II/c		Pengolah Data Perencanaan								SLTA			DINKES
70	Abdul Hamzah	19820609 200502 1 006	II/c		Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan								SPK			DINKES
71	Rizki Widiastuti,Amd.Keb	19910516 201705 2 001	II/c		Staff Kesehatan Keluarga								D III bidan			DINKES

Tabel I.2 DAFTAR TENAGA KERJA KONTRAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	NO DAN TANGGAL SK	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	KET
1.	Zulhanip. S.Kom Tg. Redeb, 24 Desember 1982	814.1/999/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	S1 Komputer	Pria	Islam	
2.	Anjar Surinto Pacitan, 02 Mei 1986	814.1/997/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SLTA	Pria	Islam	
3.	Samsul Bahri Tarakan, 31 Juli 1982	814.1/1001/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SLTA	Pria	Islam	
4.	Indra Suranti Teluk Bayur, 30 Maret 1985	814.1/3302/BKPP-I/2018 & 02 April 2018	SLTA	Wanita	Islam	
5.	Murdianto Nganjuk, 16 Mei 1986	814.1/996/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SLTA	Pria	Islam	
6.	Abdul Halim	814.1/998/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SLTA	Pria	Islam	



NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	NO DAN TANGGAL SK	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	KET
	Banjarmasin, 14 Maret 1975					
7.	Sarkiah,SKM Berau, 15 Juli 1988	814.1/1000/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	S1 Kesmas	Wanita	Islam	
8.	Tuty Handayani,SKM Tg. Redeb, 11 Januari 1990	814.1/1002/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	S1 Kesmas	Wanita	Islam	
9.	Resti Andriani,SKM Pantai Harapan, 04 Februari 1991	814.1/3090/BKPP-I/2017 & 03 Juli 2017	S1 Kesmas	Wanita	Islam	
10.	Rita Monika,SKM Sei Bedungun, 10 Juni 1991	814.1/3213/BKPP-I/2017 & 31 Ags 2017	S1 Kesmas	Wanita	Islam	
11.	Andis Risal Mislang,SKM		S1 Kesmas	Pria	Islam	
12.	Gustiansyah,Amd.ST Tg. Redeb, 12 Agustus 2018	814.1/3633/BKPP-I/2018 & 01 Nov 2018	D III Teknik	Wanita	Islam	
13.	Ns Noor Rahmad H,S.Kep Bujangga, 22 Juni 1993	814.1/3642/BKPP-I/2018 & 01 Nov 2018	S1 Perawat	Pria	Islam	
14.	Faisal Rivai,Amd.Farm Tg. Redeb, 31 Mei 1994	814.1/3635/BKPP-I/2018 & 01 Nov 2018	DIII Apoteker	Pria	Islam	
15	Hasanah,S.Si,Apt Tarakan, 30 Januari 1987	814.1/3641/BKPP-I/2018 & 01 Nov 2018	S1 Apoteker	Wanita	Islam	
16	Fadwa Ayu Putri,SKM Toli – Toli, 07 November 1992	814.1/3641/BKPP-I/2018 & 01 Nov 2018	S1 Kesehatan Masyarakat	Wanita	Islam	
17	Yuliani Dwi Lestari,SKM		S1 Kesehatan Masyarakat	Wanita	Islam	
18	Tumiran Teluk Bayur, 04 Desember 1963	814.1/993/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SD	Pria	Islam	



NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	NO DAN TANGGAL SK	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	KET
19	Bahri Sukan, 18 Juni 1986	814.1/995/BKPP-I/2017 & 03 Januari 2017	SLTA	Pria	Islam	



BAB II URUSAN KONKRUEN

A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan dan Pelayanan Dasar. Dinas Kesehatan memiliki 20 (Dua Puluh) Program dan 110 (Seratus Sepuluh) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel II.1 Program Kegiatan dan Anggaran
Dinas Kesehatan Tahun 2018**

Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	893.500.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	885.643.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	405.144.000
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	332.406.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000



Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	397.970.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	42.000.000
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.000.000
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	250.000.000
20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	2.202.352.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
10	Pengadaan mebeleur	110.285.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
5	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Perawat)	400.000.000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.301.773.600
7	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Kefarmasian 2018)	2.350.700.000
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
7	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	387.664.000
8	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	1.998.915.750
16	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	7.000.000.000
21	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bugis dan Jaringannya	808.486.000
24	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sambaliung dan Jaringannya	993.526.000
25	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Labanan dan Jaringannya	1.359.098.000
26	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merancang dan Jaringannya	1.359.027.000
27	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Batu dan Jaringannya	1.708.285.000
28	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pulau Derawan dan Jaringannya	1.040.013.000
29	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maratua dan Jaringannya	2.083.732.000
30	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tubaan dan Jaringannya	1.776.042.600
31	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Talisayan dan Jaringannya	1.746.856.000
32	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Biduk-Biduk dan Jaringannya	1.609.252.000



Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
33	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Biatan Lempake dan Jaringannya	1.713.970.000
34	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Batu Putih dan Jaringannya	2.068.023.000
35	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelay dan Jaringannya	1.638.882.000
36	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tepian Buah dan Jaringannya	1.570.363.000
37	Penyediaan Biaya Operasional (Klinik KIA)	3.932.935.800
38	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Kunjungan Dokter Spesialis	261.000.000
40	Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah	11.340.984.846
44	Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	129.621.000
46	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Redeb dan Jaringannya	602.295.500
47	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Teluk Bayur dan Jaringannya	969.303.000
48	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gunung Tabur dan Jaringannya	1.174.275.000
50	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Suaran dan Jaringannya	1.385.745.000
53	Penyediaan Biaya Operasional (UPTD JAMKESDA)	9.550.000
56	Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Melalui Penerimaan Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Bahaya Rokok oleh Aparat yang Berwenang	1.200.000.000
57	Penyediaan Biaya Operasional RS Pratama Talisayan	7.792.509.000
58	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Laai dan Jaringannya	1.840.756.500
59	Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan	196.630.000
62	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merapun dan Jaringannya	2.030.685.000
66	Biaya Operasional Kesehatan (BOK) DAK 2018	13.555.475.000
67	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Boy dan Jaringannya	966.805.400
73	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	93.120.000
74	Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja	138.000.000
76	Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji Kabupaten Berau	135.450.000
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	252.000.000
3	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	365.868.000
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	136.560.000
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	61.846.000



Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	4.096.000
8	Percepatan Pelaksanaan Kab.Berau Sehat	300.000.000
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian tambahan makanan dan vit)	186.109.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.497.800
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
5	Peningkatan Penyehatan Lingkungan	140.000.000
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	520.000.000
5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	400.062.000
8	Peningkatan imunisasi	236.500.000
9	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1.981.165.000
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
7	Peningkatan Mutu Standar Perizinan Pelayanan Kesehatan	53.450.000
8	Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan	777.672.000
14	Penyusunan Standar / Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.434.500
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
11	Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin/ Tidak Mampu Kab. Berau	2.263.356.276
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
1	Pembangunan puskesmas dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	2.658.406.000
2	Pembangunan puskesmas pembantu dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	3.729.683.000
24	Pembangunan Rumah Dokter/ Tenaga Kesehatan Lainnya	2.904.329.000
25	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Rumah Paramedis	1.001.213.000
30	Penyediaan Tanah Lokasi Sarana Kesehatan	40.000.000
31	Pengadaan Puskesmas dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya (DAK Fisik Pelayanan Dasar 2018)	5.754.038.000
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	



Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
1	Pembangunan rumah sakit	235.777.000
18	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	1.037.500.000
19	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan RS	1.010.000.000
29	Pembangunan Rumah Dinas Rumah Sakit dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	2.987.486.000
32	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	
6	Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	150.000.000
10	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak	100.000.000
11	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) DAK 2018	3.434.163.000
33	Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan	
3	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	105.000.000
36	Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
1	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Bugis	364.761.282
2	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tanjung Redeb	1.113.261.346
3	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Teluk Bayur	450.339.767
4	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Labanan	367.657.094
5	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Sambaliung	776.788.699
6	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Suaran	186.831.908
7	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Gunung Tabur	494.706.302
8	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Merancang ulu	363.012.110
9	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tanjung Batu	309.976.461
10	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Derawan	104.020.487
11	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Maratua	223.861.506
12	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tubaan	292.014.650
13	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biatan Lempake	199.256.958
14	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Talisayan	403.502.353
15	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Batu Putih	391.309.618
16	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biduk - Biduk	396.089.759
17	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Kelay	233.624.779



Kode Prog/Keg	Uraian	Anggaran
18	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tepian Buah	627.288.271
19	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Long La'ai	35.270.000
37	Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	
2	Pembangunan, Pengembangan Klinik/ IFK/ Jamkesda/ Labkesda	151.157.000
39	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana klinik/IFK/Jamkesda/ Labkesda	
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	200.000.000
3	Monitoring dan Evaluasi	100.674.000

C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan: 1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah; 4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhannya; serta 5) berlaku secara nasional.

Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM bidang Kesehatan secara nasional untuk Dua Belas jenis pelayanan



dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2018

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Realisasi Capaian SPM SMT 2017	Realisasi Capaian SPM SMT 2018	Target SPM 2018
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Cakupan K4	75	74	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Persalinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89	93	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan PKN	62	94.48	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	58	58.96	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Penjangkaran Anak (Kelas 1 & 7)	93	93.52	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Cakupan Penduduk Usia 15 – 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	8.2	19.3	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan Penduduk Usia Lanjut mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	21	26	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	35	74.2	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Cakupan Penderita Diabetes Melitus mendapatkan	66	98.4	100



No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Realisasi Capaian SPM SMT 2017	Realisasi Capaian SPM SMT 2018	Target SPM 2018
	Melitus	pelayanan kesehatan sesuai Standar			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	99	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Cakupan Orang Dengan TB mendapatkan Pelayanan TB sesuai standar	100	83	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV AIDS mendapatkan Pemeriksaan Sesuai Standar	12	50	100

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 580 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SLTP 2 orang , SLTA 176 Orang, DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 299, STRATA 1 sebanyak 96, STRATA 2 sebanyak 5 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	2
2	SLTA	176
3	DIPLOMA I (D I)	2
3	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	299
4	STRATA 1	96



NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
5	STRATA 2	5
6	STRATA 3	
JUMLAH		580

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Berau

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kab. Berau memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kab. Berau. Khusus untuk bidang pelayanan perijinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perijinan disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4
Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau
Tahun 2018

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	
2	Juru Muda TK. I/IB	
3	Juru/IC	
4	Juru TK. I/ID	
5	Pengatur Muda/IIA	1
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	22
7	Pengatur/IIC	91
8	Pengatur TK. I/IID	119
9	Penata Muda/IIIA	127
10	Penata Muda TK. I/IIIB	64
11	Penata /IIIC	59
12	Penata TK. I/IIID	90
13	Pembina /IVA	6
14	Pembina TK I/IVB	2
15	Pembina Utama Muda/IVC	1
16	Pembina Utama Madya/IVD	
17	Pembina Utama/IVE	
JUMLAH		580

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Berau



Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 58.6% pegawai Dinas Kesehatan Kab.Berau adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan DIII.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.5
Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	56
2	Pejabat Fungsional	-
	JUMLAH	56

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Berau

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan dan Pelayanan Dasar. Dinas Kesehatan memiliki 20 (Dua Puluh) Program dan 110 (Seratus Sepuluh) Kegiatan serta Anggaran.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 80 % sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 97.564.815.390 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 130.357.665.992,00. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 5.921.015.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 5.485.322.626,00 dengan persentase 92.64%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat



yang diperoleh yaitu unit kerja internal yang terlayani dengan baik yang dapat dilihat pada tabel II.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

Tabel II.6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	3.117.000	62,34	1167 Lembar	852 Imbr	73%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	893.500.000	819.818.328	91,75	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	885.643.000	752.838.500	85,00	418 Unit	418 ut	100%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	405.144.000	399.324.000	98,56	42 Orang	42 Orang	100%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000	22.000.000	100,00	6 Jenis	6 Jenis	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	332.406.000	271.505.000	81,68	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	1 Paket	1 Paket	100%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	397.970.000	389.600.000	97,90	1 Paket	1 Paket	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	2.820.000	56,40	1 Jenis	1 Jenis	100%
11	Penyediaan makanan dan minuman	42.000.000	42.000.000	100,00	750 orang	750 Orang	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.000.000	414.523.848	97,54	12 Bulan	12 bulan	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	250.000.000	249.866.000	99,95	12 Bulan	12 Bulan	100%
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	2.202.352.000	2.062.909.950	93,67	50 Orang	50 Orang	100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 140.285.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 137.232.500,00 dengan persentase 97.82 %, dimana kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal yang dapat dilihat pada tabel II.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

Tabel II.7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pengadaan mebeleur	110.285.000	107.755.000	97,71	5 Unit	5 ut	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.477.500	98,26	2 Bulan	2 Bulan	100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 303.871.726 dengan persentase 75.97 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya yang dapat dilihat pada tabel II.8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

Tabel II.8



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Perawat)	400.000.000	303.871.726	75.97	92 Orang	89 org	96%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.800.000,00 dengan persentase 56 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu hasil penilaian Lkkip yang baik dapat dilihat pada tabel II.9 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut :

Tabel II.9

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000	2.800.000	56	6 Laporan	6 Laporan	100%

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 4.652.473.600,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 4.106.589.861,00 dengan persentase 88.27 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat



yang diperoleh yaitu puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standaryang dapat dilihat pada tabel II.10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel II.10
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.301.773.600	1.970.124.769	85,59	419	174	90%
2	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Kefarmasian 2018)	2.350.700.000	2.136.465.092	90,89	963	95	95%

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp. 78.617.276.396,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 66.658.747.834 dengan persentase 84,790%, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan dan Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas) yang dapat dilihat pada tabel II.11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel II.11
Program Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	387.664.000	336.013.954,	86,68	21 unit	21 Ut	100%
2	Pengadaan peralatan dan perbakaan kesehatan termasuk obat generik esensial	1.998.915.750	1.481.475.408	74,11	14/75/45		80%
3	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	7.000.000.000	5.513.108.900	78,76	19 pusk	14 Pusk	100%
4	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	808.486.000	766.948.980	94,86	3 kel	3 kel	100%



No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
	Puskesmas Bugis dan Jaringannya						
5	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sambaliung dan Jaringannya	993.526.000	928.341.796	93,44	11 kampung	11 kampung	100%
6	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Labanan dan Jaringannya	1.359.098.000	1.316.889.648	96,89	4 kampung	4 Kampung	100%
7	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merancang dan Jaringannya	1.359.027.000	1.276.275.683	93,91	5 kampung	5 Kampung	100%
8	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Batu dan Jaringannya	1.708.285.000	1.404.396.000	82,21	4 kampung	4 kampung	100%
9	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pulau Derawan dan Jaringannya	1.040.013.000	937.066.760	90,10	1 kampung	1 kampung	100%
10	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maratua dan Jaringannya	2.083.732.000	1.904.164.570	91,38	4 kampung	4 Kampung	100%
11	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tubaan dan Jaringannya	1.776.042.600	1.644.623.070	92,60	6 kampung	6 Kampung	100%
12	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Talisayan dan Jaringannya	1.746.856.000	1.668.172.670	95,50	10 kampung	10 Kampung	100%
13	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Biduk-Biduk dan Jaringannya	1.609.252.000	1.438.136.250	89,37	6 kampung	6 Kampung	100%
14	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Biatan Lempake dan Jaringannya	1.713.970.000	1.586.320.070	92,55	8 kampung	8 Kampung	100%
15	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Batu Putih dan Jaringannya	2.068.023.000	1.938.349.000	93,73	7 kampung	7 Kampung	100%
16	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelay dan Jaringannya	1.638.882.000	1.588.056.740	96,90	4 kampung	4 Kampung	100%
17	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tepian Buah dan Jaringannya	1.570.363.000	1.408.293.000	89,68	9 kampung	9 Kampung	100%



No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
18	Penyediaan Biaya Operasional (Klinik KIA)	3.932.935.800	2.435.620.415	61,93	600 orang	2879 org	100%
19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Kunjungan Dokter Spesialis	261.000.000	222.723.700	85,33	3 kecamatan	3 Kecamatan	100%
20	Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah	11.340.984.846	8.911.080.978	78,57	2317 org	2267 org	97%
21	Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	129.621.000	82.568.200	63,70	21 pusk	21 Pusk	100%
22	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Redeb dan Jaringannya	602.295.500	475.878.050	79,01	3 kel	3 Kel	100%
23	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Teluk Bayur dan Jaringannya	969.303.000	850.148.701	87,71	2 kel	2 Kel	100%
24	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gunung Tabur dan Jaringannya	1.174.275.000	1.011.739.540	86,16	2 kel	2 kel	100%
25	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Suaran dan Jaringannya	1.385.745.000	1.335.755.040	96,39	6 kampung	6 Kamp	100%
26	Penyediaan Biaya Operasional (UPTD JAMKESDA)	9.550.000	5.207.000	54,52	100%	100%	100%
27	Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Melalui Penerimaan Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Bahaya Rokok oleh Aparat yang Berwenang	1.200.000.000	1.046.023.434	87,17	13 keg	12 Keg	92%
28	Penyediaan Biaya Operasional RS Pratama Talisayan	7.792.509.000	7.215.648.450	92,60	65%	60%	100%
29	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Laai dan Jaringannya	1.840.756.500	1.729.150.950	93,94	4 kamp	4 Kamp	100%
30	Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan	196.630.000	136.760.000	69,55	13 kec	4 Kec	100%
31	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merapun dan Jaringannya	2.030.685.000	1.883.678.390	92,76	5 kamp	5 Kamp	100%
32	Biaya Operasional Kesehatan (BOK) DAK 2018	13.555.475.000	11.023.833.589	81,32	18 pusk	18 Pusk	100%
33	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	966.805.400	816.472.400	84,45	5 kamp	5 Kamp	100%



No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
	Puskesmas Long Boy dan Jaringannya						
34	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	93.120.000	93.120.000	100	420 org	420 org	100%
35	Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja	138.000.000	116.550.000	84,46	45 org	44 org	98%
36	Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji Kabupaten Berau	135.450.000	130.156.498	96,09	150 jamaah	150 jamaah	100%

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dianggarkan sebesar Rp. 754.428.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 669.804.050,00 dengan persentase 88,78 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat (6). Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel II.12 Program Pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tabel II.12
Program Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	252.000.000	193.715.000	76,87	350 ut, 24 org	315 ut, 23 or	90%
2	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	365.868.000	346.378.050	94,67	512 Sampel	512 Sampel	100%
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	136.560.000	129.711.000	94,98	21 Puskesmas	21 Puskesmas	100%



8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp. 754.428.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 332.712.000,00 dengan persentase 90,92 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel II.13 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel II.13

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	61.846.000	56.715.000	91,70	9 Jenis	9 jenis	100%
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	4.096.000	4.096.000	100	100 %	100 %	100 %
3	Percepatan Pelaksanaan Kab.Berau Sehat	300.000.000	271.901.000	90,63	1 pkt	1 pkt	100 %

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp. 189.606.800,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 187.775.600,00 dengan persentase 99,03 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi Masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya Status Gizi Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel II.14 Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebagai berikut :

Tabel II.14



Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian tambahan makanan dan vit)	186.109.000	184.277.800	99,02	PMT Balita Gizi Buruk (36), PMT Balita Kurus, Stunting (610), PMT Bumil KEK(351)	1 Paket	100%
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.497.800	3.497.800	100	100 %	100%	100%

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 111.036.500,00 dengan persentase 79,31 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel II.15 Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebagai berikut :

Tabel II.15

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Penyehatan Lingkungan	140.000.000	111.036.500	79.31	50%	50%	90%

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dianggarkan sebesar Rp. 3.137.727.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.448.062.873,00 dengan persentase 46,15 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis



Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel II.16 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagai berikut :

Tabel II.16

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	520.000.000	471.981.000	90,77	350 Fokus	290 Fokus	95%
2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	400.062.000	363.302.800	90,81	21 Pusk	21 Pusk	100%
3	Peningkatan imunisasi	236.500.000	99.162.000	41,93	21 Pusk	21 Pusk	100%
4	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1.981.165.000	513.617.073	25,93	100%	100%	100%

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 837.556.500,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 669.424.800,00 dengan persentase 79,93 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang dapat dilihat pada tabel II.17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel II.17

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)



1	Peningkatan Mutu Standar Perizinan Pelayanan Kesehatan	53.450.000	44.733.800	83,69	93%	85%	91%
2	Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan	777.672.000	618.256.600	79,50	5 Unit	1 unit	90%
3	Penyusunan Standar / Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.434.500	6.434.400	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang dianggarkan sebesar Rp. 2.263.356.276,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.960.850.476,00 dengan persentase 86,63 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel II.18 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin sebagai berikut :

Tabel II.18

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin/ Tidak Mampu Kab. Berau	2.263.356.276	1.960.850.476	86,63	6.712 org	5.712 org	100%

14. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Pelaksanaan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya yang dianggarkan sebesar Rp. 16.087.669.000,00 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 8.498.089.527,00 dengan persentase 52,82 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan



Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya sesuai standar yang dapat dilihat pada tabel II.19 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya sebagai berikut :

Tabel II.19
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pembangunan puskesmas dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	2.658.406.000	2.370.235.807	89,16	1 unit	.1 unit	100%
2	Pembangunan puskesmas pembantu dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	3.729.683.000	3.048.495.793	81,74	5 unit	5 unit	100%
3	Pembangunan Rumah Dokter/ Tenaga Kesehatan Lainnya	2.904.329.000	2.558.442.769	88,09	1 unit	1 Unit	100%
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Rumah Paramedis	1.001.213.000	494.427.157	49,38	2 unit	2 Unit	100%
5	Penyediaan Tanah Lokasi Sarana Kesehatan	40.000.000	0	0	1 unit		0%
6	Pengadaan Puskesmas dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya (DAK Fisik Pelayanan Dasar 2018)	5.754.038.000	26.488.000	0,46	1 unit		0%

15. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Pelaksanaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata yang dianggarkan sebesar Rp. 5.270.763.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 4.031.315.625,00 dengan persentase 76,48 %, dimana kegiatan ini bertujuan



Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Persentase RS yang sesuai standaryang dapat dilihat pada tabel II.20 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata sebagai berikut :

Tabel II.20

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pembangunan rumah sakit	2.658.406.000	230.468.584	97,75	1 unit	1 unit	100%
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	1.037.500.000	593.605.137	57,21	1 Paket	1 Paket	100%
3	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan RS	1.010.000.000	807.572.250	79,96	1 Paket	1 Paket	100%
4	Pembangunan Rumah Dinas Rumah Sakit dan Pengadaan Sarana Penunjang Lainnya	2.987.486.000	2.399.669.654	80,32	1 unit	1 unit	100%

16. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak yang dianggarkan sebesar Rp. 5.270.763.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.443.883.358,00 dengan persentase 66,33 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Menurunnya Kematian Ibu Melahirkanyang dapat dilihat pada tabel II.21 Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak sebagai berikut :

Tabel II.21

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

No.	Kegiatan	Anggaran	Capaian	Keluaran	Capaian
-----	----------	----------	---------	----------	---------



		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	150.000.000	137.559.100	91,71	6 Keg	2 Keg	100%
2	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak	100.000.000	93.440.000	93,44	42 orang	42 Org	100%
3	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) DAK 2018	3.434.163.000	2.212.884.258	64,44	40 %	40%	100%

17. Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan

Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 102.749.900,00 dengan persentase 97,86 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Teknologi yang dapat dilihat pada tabel II.22 Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel II.22

Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	105.000.000	102.749.900	97,86	21 Puskesmas	21 Puskesmas	100%

18. Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dianggarkan sebesar Rp. 7.333.573.350 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp 5.672.868.664,37 ,00 dengan persentase%, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan



sasaran strategis Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel II.23 Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai berikut :

Tabel II.23
Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Bugis	364.761.282	307.458.116	84,29	4.038 org		
2	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tanjung Redeb	1.113.261.346	726.348.603	65,25	9.244 org	2.448 org	
3	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Teluk Bayur	450.339.767	352.729.449	78,33	3.862 org		
4	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Labanan	367.657.094	228.478.894	62,14	2.872 org		
5	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Sambaliung	776.788.699	456.960.571	58,83	5.669 org		
6	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Suaran	186.831.908	163.861.008	87,71	1.760 org		
7	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Gunung Tabur	494.706.302	467.417.947	94,48	5.834 org		
8	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Merancang Ulu	363.012.110	257.637.991,	70,97	3.522 org		
9	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP	309.976.461	265.432.345	85,63	3.319 org		



No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
10	Puskesmas Tanjung Batu Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Derawan	104.020.487	80.526.700	77,41	7.128 org		
11	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Maratua	223.861.506	260.153.317	116,2	2.451 org		
12	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tubaan	292.014.650	220.802.600	75,61	2.635 org		
13	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biatan Lempake	199.256.958	176.563.658	88,61	951 org		
14	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Talisayan	403.502.353	332.610.400	82,43	3.934 org		
15	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Batu Putih	391.309.618	267.287.360	68,31	3.352 org		
16	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biduk - Biduk	396.089.759	425.361.055	107,4	3.797 org		
17	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Kelay	233.624.779	149.509.275	64	1.808 org		
18	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tepian Buah	627.288.271	533.729.374	85,09	4.184 org		
19	Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Long La'ai	35.270.000		0			

19. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana klinik/IFK/Jamkesda/ Labkesda

Pelaksanaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana klinik/IFK/Jamkesda/ Labkesda yang dianggarkan sebesar Rp. 151.157.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 148.854.033,00 dengan persentase 98,48 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan



sasaran strategis Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu sarana dan prasarana Klinik/ IFK/ Jamkesda/ Labkesda yang memenuhi standaryang dapat dilihat pada tabel II.24 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana klinik/IFK/Jamkesda/ Labkesda sebagai berikut :

Tabel II.24

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana klinik/IFK/Jamkesda/ Labkesda

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pembangunan, Pengembangan Klinik/ IFK/ Jamkesda/ Labkesda	151.157.000	148.854.033	98,48	1 ut	1 ut	100%

20. Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular yang dianggarkan sebesar Rp. 300.674.000dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 265.692.100,00 dengan persentase 88,37 %, dimana kegiatan ini bertujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran strategis Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu Persentase desa yang melaksanakan posbindu yang memenuhi standar yang dapat dilihat pada tabel II.25 Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular sebagai berikut :

Tabel II.25

Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	200.000.000	166.418.100	83,21	21 Pusk	21 Pusk	100%
2	Monitoring dan Evaluasi	100.674.000	99.274.000	98,61	21 Pusk	21 Pusk	100%

F. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan (DPPA Tahun Anggaran 2018) yang dilaksanakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sudah sesuai dengan program kegiatan Kesehatan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel II.26 sebagai berikut :

Tabel II.26

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Program RKPD dan Program DPPA Dinas Kesehatan 2018

NO	PROGRAM RKPD	PROGRAM DPPA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
11	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12	Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular
13	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
14	Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan	Program Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan
15	Program pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringanannya	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Kegiatan yang dilakukan secara



terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, Peningkatan Kesehatan, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan oleh Pemerintah atau Masyarakat). Sarana kesehatan Pemerintah di Kabupaten Berau meliputi :

1. Rumah Sakit terdiri 1 (satu) unit rumah sakit umum daerah (RSUD) Type C dan pada tahun 2014 telah dibangun Rumah sakit pratama di Talisayan .
2. Puskesmas 21 unit berdasarkan Jumlah Penduduk dan Kondisi Geografis Kabupaten Berau maka Puskesmas di Kabupaten Berau masih termasuk Kategori Kurang dan pada dan direncanakan akan di tambah dengan Merapun pada tahun 2015 namun masih terkendala dengan Ketersediaan Lahan untuk puskesmas.
3. Pumas Pembantu dan Poskesdes sesuai dengan Standar bahwa Setiap Kampung ditempatkan 2 tenaga yaitu Perawat dan Bidan sehingga harus dilengkapi dengan sarana Pustu (Tenaga keperawatan) dan Poskesdes (Pelayanan Kebidanan) sampai dengan tahun 2014 dari 110 kel/Kampung yang memiliki Pustu 111 dan Poskesdes yang ada baru 44 unit dari 110 kel/kampung (40%) sehingga masih kekurangan 60 % akan dilengkapi secara bertahap.
4. Laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda) sampai dengan akhir tahun 2014 sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang (Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, Tenaga masih sangat terbatas
5. UPTD Jamiman Kesehatan Daerah (Jamkesda) sampai saat ini belum mempunyai Kantor tetap (masih menyewa) .
6. Instalasi Farmasi Kabupaten sarana Prasana yang dimiliki masih termasuk Kategori kurang termasuk Kondisi Bangunan /Gedung yang perlu untuk direhabilitasi.
7. Roda 2 masih termasuk kategori sangat kurang padahal R2 sangat diperlukan di puskesmas, pustu dan poskesdes sebagai kendaraan operasional pelayanan kesehatan dilapangan.



Demikian juga halnya dengan Alat Kesehatan yang ada pada sarana kesehatan tersebut pada umumnya masih kurang dari kebutuhan. Secara lengkap Data Sarana Prasarana Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II. 27
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	30		
2	Kendaraan Roda 2	201		
3	Gedung Kantor	165		
4	Kursi	395		Kursi kerja 317 Bangku Tunggu 73 Sofa 5
5	Meja	389		Meja Kerja 323 Meja Makan 66
6	Komputer PC	17		Komputer pc 17 Cpu 8
7	Printer	98		
8	Note Book / Laptop	76		
9	Air Conditioner	56		
10	Papan Struktur Organisasi	13		
11	Papan Pengumuman	16		
12	UPS	19		
13	Lemari Arsip	151		Lemari arsip 66 Lemari penyimpanan 85
14	Brankas	2		
15	Mesin Ketik Manual	10		
16	Wireless	25		
17	Mesin Foto Kopi	1		
18	Televisi	24		
19	Dispenser	8		
20	Infocus/Proyektor	29		

H. Permasalahan dan Solusi



Kendala yang dihadapi dan merupakan permasalahan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Berau adalah sebagai Berikut :

- 1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (Target 2018 = 100 % realisasi 74 %)
 - ❖ Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Pemeriksaan Berkala pada saat hamil
 - ❖ Rendahnya Sistem pencatatan yang ada di fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta (dokter praktek dan Bidan Praktek)
 - ❖ Tidak tersedianya Dana Monev untuk Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Solusi

- ❖ Penguatan pelaksanaan Kelas Ibu hamil dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor
 - ❖ Penguatan pelaksanaan pendampingan Ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan Kader
 - ❖ Mengusulkan kegiatan Penguatan Jejaring Data
 - ❖ Mengusulkan kegiatan Monev Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- 2) Cakupan Persalinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Target 2018 = 100 %, Realisasi 93 %,
 - ❖ Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang di tolong oleh tenaga yg mempunyai Kompetensi Kebidanan dan dilakukan di fasilitas kesehatan, tenaga yang berkompeten cukup tersedia tetapi fasilitas kesehatan yang ada belum memenuhi standar sebagai tempat untuk melakukan pertolongan persalinan.

Solusi

- ❖ Untuk Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes yang kelengkapan sarana dan prasarana yg jauh dari standar menggunakan Dana Jampersal untuk peningkatan Pertolongan persalinan di faskes yg



terstandar, dengan membawa ibu bersalin ke Faskes yang terstandart

- ❖ Memberi masukan kepada lintas program tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang di perlukan untuk melakukan pertolongan Persalinan yang terstandart

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatus (Target 2018 = 100 %, Realisasi 94.48 %)

- ❖ Masih ada Persalinan yang di lakukan di Non Faskes dan di tolong oleh Non Nakes
- ❖ Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini masih rendah
- ❖ Pengaruh sosial budaya di masyarakat masih kuat
- ❖ Tingkat Pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah

Solusi

- ❖ Meningkatkan upaya advokasi kepada kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor diwilayah kerja masing-masing
- ❖ Memaksimalkan kemitraan dengan dukun
- ❖ Meningkatkan pengetahuan masy melalui media penyuluhan.
- ❖ Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil
- ❖ Penguatan komitmen tenaga kesehatan mengenai sistem pencatatan dan pelaporan

4) Cakupan Pelayanan Anak Balita (Target 2018 = 100 %, Realisasi 58.96 %,

- ❖ Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki balita untuk membawa anaknya ke posyandu terutama setelah usia vaksinasi selesai.
- ❖ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan & perkembangan balita
- ❖ Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi posyandu



Solusi

- ❖ Penguatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
- ❖ Meningkatkan pengetahuan ibu2 yang memiliki balita melalui media penyuluhan
- ❖ Pemantauan peningkatan pelaksanaan kelas ibu balita
- ❖ Memantau pemanfaatan BOK dan sumber dana lainnya terkait sweeping pelayanan kesehatan bayi sesuai standar

5) Cakupan Penjaringan Anak (Kelas 1 & 7) (Target 2018 = 100 %, Realisasi 93.52 %

- ❖ Kurangnya pemahaman petugas tentang SPM penjaringan
- ❖ Saat melakukan penjaringan tidak semua anak hadir disekolah
- ❖ Kurangnya dukungan pihak sekolah tentang makna penjaringan
- ❖ Peralatan pendukung penjaringan yang masih banyak belum tersedia
- ❖ Sosialisasi masih belum maksimal

Solusi

- ❖ Peningkatan SDM petugas melalui pelatihan, bimtek
- ❖ Penyuluhan kepada sekolah2 mengenai program penjaringan
- ❖ Advokasi kepada pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan penjaringan dan memberikan feed back hasil penjaringan

- ❖ Peningkatan sarana prasarana pendukung
 - ❖ Sosialisasi & penyebaran informasi melalui media massa
- 6) Cakupan Penduduk Usia 15 – 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 19.3 %,
- ❖ Kunjungan ke POSBINDU pada usia produktif masih rendah
 - ❖ Kurangnya sosialisasi petugas tentang Posbindu
 - ❖ Kesadaran masyarakat tentang Kesehatan masih kurang

Solusi

- ❖ Dilakukan peningkatan sosialisasi tentang Posbindu dan PTM ke masyarakat



- ❖ Peningkatan SDM petugas dalam pelaksanaan program
 - ❖ Sudah diusulkan di dana BOK masing-masing PKM untuk dibentuk Posbindu di SLTA untuk peningkatan capaian pelayanan kesehatan pada usia anak sekolah tingkat atas
- 7) Cakupan Penduduk Usia Lanjut mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 26 %
- ❖ Tidak tersedianya alat beserta stick untuk melakukan pemeriksaan GDS dan Kolesterol
 - ❖ Kesadaran masyarakat tentang Kesehatan masih kurang

Solusi

- ❖ Mengusulkan kepada bagian Alkes di Dinas Kesehatan untuk dapat mengadakan alat dan stik pemeriksaan GDS dan Kolesterol
 - ❖ Mengusulkan kepada setiap kampung agar mengalokasikan melalui ADK untuk pengadaan alat dan stick guna melakukan pemeriksaan tersebut sehingga bisa menaikkan capaian pel.kesehatan Lansia , dimana alat beserta stik akan di pegang , di simpan dan digunakan oleh kader di setiap kampung tersebut dengan catatan bahwa puskesmas yang membawahi kampung tersebut tidak mendapatkan alat beserta stik pemeriksaan dari Dinas Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih pengadaan melalui APBD ataupun ADK
- 8) Cakupan Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 74.2 %
- ❖ Laporan dari praktek (Dokter praktek swasta) : belum semua memberikan laporan walaupun sudah diberikan edaran oleh bidang P2P Dinkes
 - ❖ Cakupan Laporan Puskesmas Masih Tidak Sesuai dengan Jumlah Posbindu yang ada
 - ❖ Belum adanya Posbindu Khusus di Masing – masing SLTA yang ada di kab. Berau



- ❖ Tidak adanya dana tahun 2017 dan 2018 untuk kegiatan pelatihan bagi pemegang program PTM puskesmas dan evaluasi program PTM
- ❖ Belum adanya perbaikan sistem pelaporan PTM

Solusi

- ❖ Melakukan koordinasi ulang ke dokter praktek swasta untuk mengirimkan laporan kunjungan PTM ke Dinkes melalui Puskesmas setempat
- ❖ Melakukan Sosialisasi ke masyarakat, TOMA dan kader tentang PTM dan Posbindu dalam rangka meningkatkan kunjungan Posbindu
- ❖ Membentuk Posbindu Khusus di SLTA Kabupaten Berau melalui Dana BOK Puskesmas masing – masing (Sasaran PTM Usia 15 <)
- ❖ Melakukan Advokasi ke DPRD, Bapelitbang dan Bupati
- ❖ Melakukan perbaikan sistem pelaporan PTM

9) Cakupan Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 98.4 %

- ❖ Laporan dari praktek (Dokter Praktek Swasta) : belum semua memberikan laporan walaupun sudah diberikan edaran oleh bidang P2P dinkes
- ❖ Cakupan laporan puskesmas masih tidak sesuai dengan jumlah Posbindu yang ada
- ❖ Belum adanya posbindu khusus di masing – masing SLTA yang ada di Kab. Berau
- ❖ Tidak adanya dana Tahun 2017 dan 2018 untuk kegiatan pelatihan bagi pemegang program PTM Puskesmas dan evaluasi program PTM
- ❖ Belum adanya perbaikan sistem pelaporan sistem pelaporan PTM

Solusi

- ❖ Melakukan koordinasi ulang ke dokter Praktek swasta untuk mengirimkan laporan kunjungan PTM ke Dinkes



- ❖ Meningkatkan kunjungan Posbindu di Puskesmas dengan cara bekerjasama dengan program promkes melalui peningkatan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat
 - ❖ Membentuk Posbindu khusus di SLTA Kabupaten Berau melalui dana BOK Puskesmas masing-masing
 - ❖ Melakukan Advokasi ke DPRD, bapelitbang dan Bupati
 - ❖ Melakukan Perbaikan sistem Pelaporan PTM
- 10) Cakupan ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 99 % ,)
- ❖ Masih adanya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung (bebas pasung tahun 2017).
 - ❖ Masyarakat masih takut dengan ODGJ.
 - ❖ RSUD Dr. A. Rivai belum mempunyai ruang khusus rawat inap bagi penderita ODGJ walaupun sudah memiliki dokter spesialis jiwa
 - ❖ Tidak adanya dana tahun 2017 dan 2018.

Solusi

- ❖ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bebas pasung bagi penderita ODGJ melalui dana BOK puskesmas
 - ❖ Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan KIE kepada keluarga penderita ODGJ melalui petugas Puskesmas setempat
 - ❖ Membuat surat ke Bupati dan RSUD dr. Abdul Rivai agar segera membuka ruang khusus rawat inap bagi penderita ODGJ
 - ❖ Mengusulkan dana melalui APBD-P Tahun 2018 dan sudah di Advokasi oleh Bupati Berau.
- 11) Cakupan Orang Dengan TB mendapatkan Pelayanan TB sesuai standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 83 % ,
- ❖ Semua pemegang program TB belum ada yang bisa aplikasi SITT
 - ❖ Banyak pasien yang default (putus pengobatan)
 - ❖ Sebagian besar pemegang program dan Analis belum pelatihan



- ❖ Tempat pasien yang jauh dari pelayanan kesehatan sehingga kesulitan untuk pergi berobat
- ❖ Kurangnya kesadaran pasien untuk rutin meminum obat
- ❖ Laporan dari Puskesmas lambat dan tidak lengkap

Solusi

- ❖ Supervisi ke Puskesmas
- ❖ Survei kontak pelacakan kasus default
- ❖ Mengajukan untuk pelatihan bagi pemegang program dan Analis
- ❖ Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya meminum obat secara rutin
- ❖ Kerjasama dengan lintas sektor yang terkait
- ❖ Mengingatkan kepada pemegang program agar tepat waktu dalam mengirim laporan

12) Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV AIDS mendapatkan Pemeriksaan Sesuai Standar (Target 2018 = 100%, Realisasi 50 %

- ❖ Tidak tercukupinya logistik untuk pemeriksaan HIV/AIDS sehingga sasaran yang berisiko tidak bisa diperiksa semua
- ❖ Anggaran pengadaan logistik tidak mencukupi untuk sasaran yang ada
- ❖ Pemegang program di Puskesmas belum ada yang di latih, sehingga kalau ada kasus pemegang program Kabupaten yang turun kelapangan.

Solusi

- ❖ Mengusulkan untuk kebutuhan logistik rapid HIV/AIDS sesuai sasaran yang berisiko
- ❖ Mengusulkan anggaran ke PEMDA untuk pengadaan logistik rapid HIV/AIDS
- ❖ Mengusulkan untuk mengadakan pelatihan pemegang program Puskesmas



BAB III

REALISASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2018

A. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Program dan 52 (Lima puluh) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel III.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	61.846.000
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	4.096.000
	Percepatan Pelaksanaan Kab.Berau Sehat	300.000.000
2	Prog. Lingkungan Sehat	
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan	140.000.000
3	Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	387.664.000
	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	1.998.915.750
	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	7.000.000.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bugis dan Jaringannya	808.486.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sambaliung dan Jaringannya	993.526.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Labanan dan Jaringannya	1.359.098.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merancang dan Jaringannya	1.359.027.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Batu dan Jaringannya	1.708.285.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pulau Derawan dan Jaringannya Ngannya	1.040.013.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maratua dan Jaringannya	2.083.732.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tubaan dan Jaringannya	1.776.042.600
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Talisayan dan Jaringannya	1.746.856.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas	1.609.252.000



No	Program dan Kegiatan	Anggaran
	Biduk-Biduk dan Jaringannya	
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Biatan Lempake dan Jaringannya	1.713.970.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Batu Putih dan Jaringannya	2.068.023.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelay dan Jaringannya	1.638.882.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tepian Buah dan Jaringannya	1.570.363.000
	Penyediaan Biaya Operasional (Klinik KIA)	3.932.935.800
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Kunjungan Dokter Spesialis	261.000.000
	Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah	11.340.984.846
	Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	129.621.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanjung Redeb dan Jaringannya	602.295.500
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Teluk Bayur dan Jaringannya	969.303.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gunung Tabur dan Jaringannya	1.174.275.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Suaran dan Jaringannya	1.385.745.000
	Penyediaan Biaya Operasional (UPTD JAMKESDA)	9.550.000
	Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Melalui Penerimaan Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Bahaya Rokok oleh Aparat yang Berwenang	1.200.000.000
	Penyediaan Biaya Operasional RS Pratama Talisayan	7.792.509.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Laai dan Jaringannya	1.840.756.500
	Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan	196.630.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merapun dan Jaringannya	2.030.685.000
	Biaya Operasional Kesehatan (BOK) DAK 2018	13.555.475.000
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Boy dan Jaringannya	966.805.400
	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	93.120.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja	138.000.000
	Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji Kabupaten Berau	135.450.000
4	Prog.Upaya Kesehatan Perorangan	
5	Prog. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit	
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	520.000.000
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	400.062.000
	Peningkatan imunisasi	236.500.000
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1.981.165.000
6	Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat	



No	Program dan Kegiatan	Anggaran
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	186.109.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.497.800
7	Prog. Sumber Daya Kesehatan	
	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Perawat)	400.000.000
8	Prog. Obat & Perbekalan Kesehatan	
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.301.773.600
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Kefarmasian 2018)	2.350.700.000
9	Prog. Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	
10	Prog. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	
11	Prog. Pengawasan Obat & Makanan	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	252.000.000
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	365.868.000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	136.560.000
12.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 754.428.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 332.712.000 atau 90,92%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

Keluaran : Pengadaan Media Cetak Pendukung Promosi Kesehatan Melalui (poster, leaflet, baliho, X - Benner, spanduk, brosur, stiker, Pin, Mug, Kipas, Tas, Neon Bok, Runing Teks, kalender) dengan capaian kinerja 55%.

Hasil : Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat, Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup



sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan pola hidup sehat padamasyarakat melalui seminar kesehatan dengan capaian kinerja 55%.

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang pola hidup sehat, Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat.

c. Percepatan Pelaksanaan Kab.Berau Sehat

Keluaran : Terlaksananya Percepatan Pelaksanaan Kab. Berau Sehatdengan capaian kinerja 55%.

Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif (Purnama dan mandiri), Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sertaberperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat

2. Prog. Lingkungan Sehat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Lingkungan Sehat sebesar Rp. 140.000.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 111.036.500 atau 79.31%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Peningkatan Penyehatan Lingkungan

Keluaran : Jumlah Persentase kampung/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (persen) capaian kinerja 50%.

Hasil : Jumlah Sarkes yang melaksanakan Klinik Sanitasi sesuai standar (sarana), Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat



3. Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 78.617.276.396 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 66.658.747.834 atau 84.79 %, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Keluaran : Jumlah Sarkes yang mendapatkan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

b. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Keluaran : Jumlah Puskesmas/Pustu/Poskesdes dengan peralatan medis sesuai standar capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

c. Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam

Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan 24 jam capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

d. Biaya Operasional dan Pemeliharaan 21 Puskesmas dan Jaringannya

Keluaran : Pelayanan Kesehatan dalam dan luar gedung



puskesmas dan jaringannya Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

e. Penyediaan Biaya Operasional (Klinik KIA)

Keluaran : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan , Rawat Inap Klinik Bersalin Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Kunjungan Dokter Spesialis

Keluaran : Jumlah kunjungan dokter spesialis ke kecamatan Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

g. Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah

Keluaran : Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan pembiayaan kesehatan melalui Jamkesda Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

h. Operasional Jaminan Pemeliharaan

Keluaran : Terlaksananya Monitoring/Pengendalian Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas



tentang pelaksanaan JKN Pusk Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

i. Penyediaan Biaya Operasional (UPTD JAMKESDA)

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jamkesda Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas),Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan

j. Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Melalui Penerimaan Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Bahaya Rokok oleh Aparat yang Berwenang.

Keluaran : Terfasilitasinya pelayanan kes masy & penegakan hukum thd dmpk bahaya rokok serta pembentukan/pembuatan regulasi, sosialisasi regulasi , media Promosi, Pencanangan (Deklarasi) KTR,dt penyakit akibat rokok, penyuluhan,keg upaya Masy Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas),Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

k. Penyediaan Biaya Operasional RS Pratama Talisayan

Keluaran : Terpenuhinya peralatan kesehatan, kefarmasian, SDM kesehatan dan sarana prasarana RS dalam rangka pelayanan rumah sakit Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya



akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

I. Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan

Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan P3K/pendampingan Tamu VIP Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

m. Biaya Operasional Kesehatan (BOK) DAK 2018

Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan preventif dan promotif Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

n. Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Olah Raga

Keluaran : Jumlah jamaah Haji yang diukur kebugarannya Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

o. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja

Keluaran : Jumlah tenaga Pengelola Program Keselamatan dan Kesehatan kerja yang mengikuti pelatihan sesuai standar Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan



Rujukan

p. Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji Kabupaten Berau

Keluaran : Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Capaian kinerja 92.5 %.

Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (Utilisasi Puskesmas), Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

4. Prog.Upaya Kesehatan Perorangan

5. Prog. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 3.137.727.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.448.062.873 atau 46,15 %, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Keluaran : Terlaksananya Pemberantasan Vektor melalui Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Capaian kinerja 100 %.

Hasil : Persentase penduduk Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar (SPM), Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (SPM)

b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Capaian kinerja 100 %.

Hasil : Persentase penduduk Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar (SPM), Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (SPM)



c. Peningkatan imunisasi

Keluaran : Terlaksananya Imunisasi pada puskesmas dan jaringannya Capaian kinerja 100 %.

Hasil : Persentase penduduk Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar (SPM), Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (SPM)

d. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Keluaran : Teridentifikasinya suatu keadaan penyakit disuatu wilayah berdasarkan tempat, waktu, orang secara cepat Capaian kinerja 100 %.

Hasil : Terwujudnya Pelayanan Investigasi di Masyarakat terhadap penularan Penyakit, Menurunnya Angka kesakitan akibat penyakit menular & Tidak Menular

6. Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 3.137.727.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.448.062.873 atau 46,15 %, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian tambahan makanan dan vit)

Keluaran : Jumlah PMT Balita (Kurus, Stunting), PMT Balita Gizi Buruk dan PMT Bumil KEK Capaian kinerja 7 %.

Hasil : Prevalensi Balita Kurang Gizi

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Evaluasi Program Gizi dan Monev Prog Gizi Capaian kinerja 7 %.



Hasil : Prevalensi Balita Kurang Gizi Diketahuinya hasil cakupan program Gizi serta solusi permasalahan

7. Prog. Sumber Daya Kesehatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 400.000.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 303.871.726 atau 75,97 %, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Perawat)

Keluaran : Jumlah Pegawai yang Ditingkatkan Kualifikasinya ke D3 perawat Capaian kinerja 30 %.

Hasil : Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya

8. Prog. Obat & Perbekalan Kesehatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 4.652.473.600 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 4.106.589.861 atau 88,27 %, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Keluaran : Jenis dan Jumlah obat dan vaksin di puskesmas Capaian kinerja 30 %.

Hasil : Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

9. Prog. Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat

10. Prog. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

11. Prog. Pengawasan Obat & Makanan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 754.428.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 669.804.050 atau 88,78%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :.



a. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

- Keluaran : Jumlah TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Laik Sehat), Jumlah Petugas DFI, Tenaga bersertifikat HACCP Capaian kinerja 82 %.
- Hasil : Persentase tempat usaha yang memenuhi standar kesehatan

b. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

- Keluaran : Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium bakteriologi dan kimiawii air, makanan minuman Capaian kinerja 82 %.
- Hasil : Persentase tempat usaha yang memenuhi standar kesehatan

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

- Keluaran : Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional Capaian kinerja 82 %.
- Hasil : Persentase tempat usaha yang memenuhi standar kesehatan

12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

C. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini terlihat dari realisasi fisik keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 75 %. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 3 Kegiatan yaitu dengantotal anggaran Rp. 365.942.000



realisasi keuangan Rp. 332. 712.000 (90,92%).

Permasalahan : Linsek Kawasan Tanpa Rokok yang melibatkan beberapa OPD Kab. Berau belum terlaksana karena waktu yang terbatas sehingga sulit untuk mengatur jadwal antar OPD terkait di akhir tahun.

Solusi : Mengatur jadwal lebih awal agar OPD terkait bisa melaksanakan linsek KTR tersebut

2. Prog. Lingkungan Sehat

Program Lingkungan Sehat terdiri dari 1 kegiatan yaitu dengan total anggaran Rp. 140.000.000 realisasi keuangan Rp. 111.036.000 (80%)

Permasalahan : Pengelolaan Limbah Cair Puskesmas sesuai standar dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun sampai tahun 2018 dari 21 puskesmas baru 1 puskesmas yang memiliki IPAL yaitu Puskesmas Pl. Derawan , sementara puskesmas yang lain limbah medis digabung dengan Septik tank. Penyimpanan Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) belum memiliki Perizinan TPS dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau

Solusi : Merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pengelolaan Limbah Cair Puskesmas sesuai standar pada tahun berikutnya. Penyimpanan Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sedang proses melengkapi persyaratan Perizinan TPS dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau



3. Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 36 Kegiatan dengan Total anggaran Rp 78.617.276.396 realisasi keuangan Rp. 66.658.747.834 (84.79%).

Permasalahan : Kegiatan Operasional 21 Puskesmas hampir tidak ada kendala yang berarti.

Solusi : -

4. Prog.Upaya Kesehatan Perorangan (Tidak terdapat di Anggaran Dinkes)

5. Prog. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit

Program Pencegahan & Pemberantasan Terdiri dari 4 Kegiatan dengan Total anggaran Rp. 3.137.727.000 realisasi keuangan Rp. 1.448.062.873 (46.15%).

Permasalahan : dana KLB Difteri disiapkan untuk pelaksanaan ORI dan Logistik/vaksin se kabupaten berau akan tetapi berdasarkan hasil kajian epidemiologi ORI cukup dilaksanakan di 3 Kecamatan dan 5 puskesmas. Vaksin hanya disediakan oleh kemenkes, Pemda Tidak diperbolehkan melakukan pengadaan vaksin sendiri. KLB dapat ditangani dengan cepat sehingga KLB tidak meluas ke 10 Kecamatan lainnya sehingga dana yang tersedia tidak terserap sepenuhnya.

Solusi : Dana KLB tetap di Anggarkan setiap tahun sehingga apabila terjadi KLB/Wabah bisa cepat tertangani dan bisa meminimalkan penggunaan dana yang besar.

6. Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat



Program Perbaikan Gizi masyarakat terdiri dari 2 Kegiatan dengan total anggaran Rp. 189.606.800 realisasi keuangan Rp. 187.775.600 (99%)

Permasalahan : Tidak terdapat permasalahan karena PMT sudah tersedia dan terdistribusikan dengan baik

Solusi : -

7. Prog. Sumber Daya Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 1 Kegiatan dengan total anggaran Rp 400.000.000 realisasi keuangan Rp. 303.871.726 (75.97%)

Permasalahan : Kebutuhan Operasional Keg. Tersebut sudah terpenuhi/ di akomodir Poltekkes sehingga biaya Internet, Transport dan praktek tidak digunakan

Solusi : Biaya Internet , Transport dan Praktek tidak di bebaskan pada APBD

8. Prog. Obat & Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas 1 kegiatan dengan Total anggaran Rp. 2.301.773.600 realisasi anggaran Rp. 1.970.124.769 (85.59%)

Permasalahan :

Secara umum permasalahan yang ditemui dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan baik untuk puskesmas maupun RS Pratama Talisayan adalah :

1. Pada umumnya Tenaga Farmasi di puskesmas sudah melakukan Pelayanan Kefarmasian, namun belum mencatat dan melaporkan Pelayanan Kefarmasian yang telah dilakukan dalam keseharian.
2. Anggaran tahun 2018 cukup memadai untuk mencukupi kebutuhan obat, BMHP dan reagen se Kabupaten. Pada tahun ini sudah



mendapat dana DAK Kefarmasian dari Pusat sebesar Rp 2.350.700.000,-.

3. Belum adanya Formularium Dinas Kesehatan sehingga dalam pengadaan obat saat ini mengacu langsung pada Formularium Nasional dan Daftar Obat Esensial Nasional. Untuk beberapa jenis obat diadakan sesuai pola penatalaksanaan kasus di Puskesmas.
4. Tidak semua obat masuk e-katalog LKPP.
5. Kurangnya posisi tawar Dinas Kesehatan selaku pihak pemesan/konsumen dalam proses pengadaan barang sehingga tidak bisa mendesak agar barang yang sudah dipesan melalui e-katalog bisa segera dikirim. Penyedia obat di e-katalog tidak tepat waktu dalam mengirim obat ke Dinas Kesehatan bahkan ada obat yang datang di akhir tahun meskipun transaksi di ekatalog di awal tahun.
6. Beberapa barang tidak dapat disuplai oleh distributor (e-katalog). Umumnya distributor beralasan stok barang kosong kantor cabang (Samarinda), keterlambatan suplai bahan baku dan kendala di produksi atau proses produksi belum selesai. Beberapa barang yang ditolak/ tidak datang antara lain Parasetamol sirup 120 mg/5, Alopurinol tablet dll. Surat pernyataan penolakan rata-rata disampaikan ke Dinas Kesehatan mendekati akhir tahun sehingga menyulitkan untuk mengalihkan pemesanan kepada distributor lainnya.
7. Kompetensi Tenaga Farmasi di Puskesmas masih ada beberapa yang masih rendah.

Solusi :

Mensosialisasikan lagi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bagi Pengelola Obat.

1. Menambah frekuensi Rapat Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT). Serta diadakannya Rapat TPOT di akhir tahun.
2. Mengusulkan anggaran obat melalui dana DAK.
3. Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan terkait penyusunan Formularium Dinas Kesehatan.



4. Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan terkait pengelolaan Dana JKN untuk pembelian obat dan BMHP di Puskesmas.
5. Melaporkan permasalahan pengadaan via e-katalog kepada pihak Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.
6. Meningkatkan kompetensi tenaga farmasi dalam program kefarmasian dengan mengikutsertakan pada Pelatihan ataupun kursus-kursus yang terakreditasi.
7. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.
8. Melakukan pengawasan obat dan makanan secara terpadu untuk wilayah se Kabupaten Berau.
9. Mengadakan Pertemuan Evaluasi Program Kefarmasian secara berkala.

9. Prog. Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat (Tidak terdapat di Anggaran Dinkes)

10. Prog. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (Tidak terdapat di Anggaran Dinkes)

11. Prog. Pengawasan Obat & Makanan

Program Pengawasan Obat & Makanan terdiri atas 3 Kegiatan dengan Total anggaran Rp. 754.428.000 realisasi Keuangan Rp. 669.804.050 (88.78%)

Permasalahan :

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan pangan serta pergantian petugas yang terjadi di puskesmas.

- ✚ Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan pangan.



- ✚ Untuk sistem pelaporan emonev HSP yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh puskesmas.
- ✚ Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.
- ✚ Puskesmas yang capaiannya 0% yaitu Puskesmas Long Boy (tidak ada Tenaga Kesling) dan Longlai, kemudian puskesmas yang capainya kurang dari 50% ada 6 puskesmas yaitu Pl. Derawan, Merapun, Sambaliung, Tubaan, Batu Putih, Biatan Lempake).

Solusi :

- ✚ Meningkatkan kuantitas (Pengadaan Tenaga Kontrak Kesling melalui dana BOK 2019) dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan pangan melalui Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan kesling untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan kesling dan meningkatkan kapasitas petugas kesling.
- ✚ Pembentukan tenaga inspektur HSP sampai dengan tahun 2020.
- ✚ Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada Puskesmas (melalui Hibah Kemenkes dan APBD)
- ✚ Sosialisasi dan implementasi sistem emonev HSP dengan lebih optimal sekaligus didukung oleh puskesmas /Pemerintah Kecamatan dalam hal dukungan terhadap jaringan internet yang lebih stabil.
- ✚ Peningkatan Pembiayaan BOK lagi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan pangan.



- ✚ Peningkatan koordinasi antara lintas program terkait dalam hal pelayanan dan penggerakkan masyarakat.

12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia (Terdapat pada Prog Pengawasan Obat & Makanan)



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2018 di Dinas Kesehatan tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.



BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan tidak melaksanakan Kerja Sama atau Memorial Of Understanding (MOU) antar daerah

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Palang Merah Indonesia Samarinda
- b. Palang Merah Indonesia Kabupaten Berau
- c. Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan
- d. RSUD dr. Abdul Rivai Kab. Berau
- e. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
- f. RSUD AWS Samarinda

2. Dasar Hukum

- a. Palang Merah Indonesia Samarinda
Nomor : 440/005/Jamkesda/I/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
- b. Palang Merah Indonesia Kabupaten Berau
Nomor : 440/006/Jamkesda/I/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
- c. Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan
Nomor : 440/004/Jamkesda/I/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
- d. RSUD dr. Abdul Rivai Kab. Berau
Nomor : 440/008/Jamkesda/I/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
- e. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Nomor : 440/007/Jamkesda/I/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
- f. RSUD AWS Samarinda
Nomor : 440/037/Jamkesda/V/2018 Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018

g. Bidang Kerjasama

Ruang Lingkup Perjanjian adalah Pelayanan Darah dan Kesehatan bagi masyarakat kabupaten Berau yang menggunakan kartu Jamkesda



h. NamaKegiatan

Pelayanan Darah Lengkap (Whole Blood) dan darah Komponen (PRC, FFP, TC, Plasma), Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dinas Kesehatan Kab. Berau

j. Jumlah Pegawai, Kualifkasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 580 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SLTP 2 orang , SLTA 176 Orang, DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 299, STRATA 1 sebanyak 96, STRATA 2 sebanyak 5 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1

Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	2
2	SLTA	176
3	DIPLOMA I (D I)	2
3	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	299
4	STRATA 1	96
5	STRATA 2	5
6	STRATA 3	
JUMLAH		580

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. 2

Daftar Pangkat dan Golongan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2018

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
----	--------------------	--------



NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	
2	Juru Muda TK. I/IB	
3	Juru/IC	
4	Juru TK. I/ID	
5	Pengatur Muda/IIA	1
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	22
7	Pengatur/IIC	91
8	Pengatur TK. I/IID	119
9	Penata Muda/IIIA	127
10	Penata Muda TK. I/IIIB	64
11	Penata /IIC	59
12	Penata TK. I/IIID	90
13	Pembina /IVA	6
14	Pembina TK I/IVB	2
15	Pembina Utama Muda/IVC	1
16	Pembina Utama Madya/IVD	
17	Pembina Utama/IVE	
JUMLAH		580

k. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan Total Anggaran Rp. 11.340.984.846

l. Jangka Waktu Kerjasama

Pelaksanaan Kerjasama Dilaksanakan selama 1 Tahun

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Berau tidak melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah dalam Bidang Urusan Kesehatan



BAB VI

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

A. PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

Penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Negara/Kerjasama pihak ketiga dengan Kementerian oleh Perangkat Daerah, Perorangan dan Hasil Binaan Perangkat Daerah selama atau pada tahun 2018.

1. Menteri Kesehatan Menganugerahkan tanda penghargaan Bagi Institusi Yang Berjasa Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Kepada PT Hutan Hijau Mas (Kab. Berau) sebagai perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
2. Peraih Harapan III Kategori Kabupaten Lomba Posyandu Melati Jaya, Kampung Pandan Sari Tingkat Nasional Tahun 2018

B. PENGHARGAAN TINGKAT PROPINSI

Penghargaan yang diterima dari Pemerintah Propinsi/Kerjasama pihak ketiga dengan Pemerintah Propinsi oleh Perangkat Daerah, Perorangan dan Hasil Binaan Perangkat Daerah selama atau pada tahun 2018.

1. Juara III Penghargaan peraih Mitra Bhakti Husada (MBH) PT. Hutan Hijau Mas (Kab. Berau) Tingkat Propinsi Tahun 2018.
2. Pemenang I Kategori Desa lomba Pemanfaatan TOGA & Akupresure Tahun 2018.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Kab. Berau adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Kab. Berau Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Kab. Berau Tahun Anggaran 2018, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umum dinilai berjalan dengan baik dan lancar

B. SARAN

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2018, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Berau Tahun 2016 – 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Kab. Berau ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.

.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

drg. Totoh hermanto,M.kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630812 199203 1 011